TANGERANG RAYA Media
THE LEADER OF POLITICAL NEWS IN BANTEN
JUMAT, 20 November 2026 | TangerangRaya | @hariantr | @korantangerangraya | mediatangerangraya | TANGERANG RAYA TV | www.tangerangraya.co | Edisi 3343/Harga Rp4.000

LAN Siap Jalur Hukum

SOAL PENCATUTAN LEMBAGA DALAM PROPOSAL PERMOHONAN DANA

TANGERANG | TRM

Lembaga Anti Narkotika (LAN) Kota Tangerang menyatakan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang diduga mencatut dan menyalahgunakan nama serta identitas organisasi LAN untuk mengajukan permohonan bantuan dana kepada instansi pemerintah maupun pihak lainnya.



Persoalan ini mencuat setelah ditemukan adanya surat permohonan bantuan dana yang menggunakan nama dan logo LAN, tetapi diduga tidak memiliki kejelasan legitimasi maupun keterkaitan dengan kepengurusan LAN Kota Tangerang yang sah saat ini.

Informasi tersebut terungkap ketika salah seorang panitia Rapat Kerja (Raker) LAN Kota Tangerang hendak mengambil proposal yang sebelumnya diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun, petugas keamanan mempertanyakan apakah LAN Kota Tangerang yang dimaksud merupakan organisasi yang sama dengan pihak lain yang juga mengajukan permohonan bantuan menggunakan identitas LAN.

Temuan tersebut memunculkan tanda tanya serius mengenai legalitas, kewenangan, serta pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan identitas organisasi tersebut.

Berdasarkan informasi dan dokumen yang diperoleh, surat permohonan bantuan dana itu menggunakan kop surat berlogo LAN dengan alamat Jalan Raya Serang Km 21, Telaga Bestari, Kabupaten Tangerang. Alamat tersebut diketahui merupakan alamat sekretariat kepemimpinan LAN periode sebelumnya yang dipimpin Amrul Sani, SP.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah substansi permohonan bantuan. Dalam surat tersebut tercantum tujuan penggunaan dana untuk membantu pelaksanaan tugas jurnalistik atau wartawan sekaligus kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-III yang dijadwalkan berlangsung pada 13–15 November di Anyer.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apa relevansi permohonan bantuan untuk kegiatan jurnalistik dengan identitas organisasi yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan penya-

Baca LAN ....Hal. 7

Pengedar Obat Ilegal Diciduk di Teluknaga



TANGERANG | TRM

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Metro Tangerang Kota mengungkap dugaan peredaran obat-obatan tanpa izin edar di wilayah Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial MF alias Aceng (25) beserta sejumlah barang bukti.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB, di pinggir Jalan Raya Salembaran, tepatnya di depan SPBU Salembaran, Kecamatan Teluknaga.

Penindakan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran obat tanpa izin edar di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, Unit 2 Sub 2 Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota melakukan penyelidikan dan observasi.

Petugas kemudian menemukan seorang pria dengan ciri-ciri sesuai informasi yang diterima. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 34 butir Tramadol, 66 butir Hexymer, 62 tablet putih, serta uang tunai sebesar Rp54 ribu.

Pria tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani pemeriksaan serta proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol. Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar menegaskan, pihaknya akan terus menindak

Baca PENGEDAR ....Hal. 7



Forum Pimred Multimedia Gelar FGD, Tata Kelola Pertanahan Dinilai Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nasional

JAKARTA | TRM

Ketidakpastian tata kelola pertanahan dinilai berpotensi menghambat investasi, memperlambat pembangunan, menghilangkan peluang kerja, hingga menyebabkan aset tanah yang seharusnya produktif menjadi terbengkalai.





Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Forum Pimred Multimedia Indonesia bertema "Melihat Lebih Dekat Tata Kelola Pertanahan dalam Mendorong Ekonomi Nasional" di Pakubuwono Spring, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

FGD menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, pakar agraria sekaligus anggota Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin, kuasa hukum PT Surya Prima Pratama (PT SPP) Muchibi, SH, MH, serta kuasa hukum PT GMN, M. Syawal.

Sekretaris Jenderal Forum Pimred Multimedia Indonesia, Helmy Halim, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Ngobras (Ngobrol Santai) yang secara rutin digelar setiap bulan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja.

Menurut Helmy, FGD kali ini secara khusus membahas reforma agraria dan kaitannya dengan upaya mendorong pertumbuhan serta meningkatkan perekonomian nasional.

"Dalam FGD kali ini kita ingin membahas Undang-Undang Reforma Agraria yang pada 22 September disahkan DPR RI, kemudian mengaitkannya dengan pertumbuhan dan peningkatan perekonomian nasional," ujar Helmy yang hadir mewakili Ketua Umum Forum Pimred Multimedia Indonesia, Bernadus Wilson Lumi, yang berhalangan hadir.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut diikuti sejumlah pengurus Forum Pimred serta insan pers dari berbagai platform media, mulai dari media cetak, online, televisi hingga radio.

Sementara itu, Ekonom CELIOS, Nailul Huda, menilai persoalan pertanahan berkaitan erat dengan ketimpangan penguasaan aset dan sumber daya alam.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menciptakan pemerataan kesejahteraan apabila akses terhadap sumber daya produktif masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Ia juga mengkritik anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan menciptakan efek menetes ke bawah atau trickle-down effect.

"Trickle-down effect itu tidak terjadi begitu saja. Ketika penguasaan tanah dan sumber daya alam terkonsentrasi, masyarakat yang berada di bawah justru semakin sulit mendapatkan akses terhadap aset produktif," kata Nailul.

Ia menegaskan, reforma agraria harus dimaknai sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan tanah, bukan sekadar membagikan sertifikat kepada masyarakat.

Sebab, legalitas kepemilikan tanah belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan jika tidak disertai pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, pendampingan, serta dukungan peningkatan produktivitas.

Baca FORUM ....Hal. 6

Taat Pajak, Hadiah Umrah dan Motor Menanti

TANGERANG | TRM

Membayar pajak kendaraan bermotor tidak hanya menjadi kewajiban masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan memperoleh apresiasi. Melalui program Pemerintah Provinsi Banten, wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo berkesempatan mendapatkan hadiah umrah dan sepeda motor.

Program tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong masyarakat agar semakin patuh memenuhi kewajiban perpajakan.

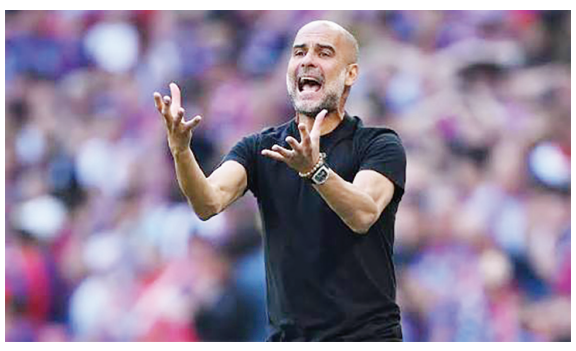
Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat itu turut dilakukan melalui Sosialisasi Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 10–19 November 2026 tersebut menyasar enam kecamatan, yakni Cipondoh, Larangan, Ciledug, Tangerang, Cibodas, dan Karawaci.

Rangkaian sosialisasi ditutup oleh Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, di Ruang Balairung Kecama-

Baca TAAT ....Hal. 7



Pep Guardiola Akan Kembali Melatih



JAKARTA | TRM

Pep Guardiola siap kembali melatih. Keputusan finalnya sebelum musim depan dimulai alias saat musim panas nanti!

Hal itu diungkapkan oleh agennya, Josep Maria Orobitg. Orobitg lebih dulu sebut, Pep Guardiola sudah tolak tawaran-tawaran dari Arab Saudi.

"Dalam beberapa hari terakhir, kami menerima tawaran dari Arab Saudi melalui perantara, namun Guardiola sama sekali tidak bersedia," jelasnya dilansir dari Tribuna.

Pep Guardiola tinggalkan Manchester City di musim panas 2026 kemarin. Posisinya digantikan Enzo Maresca.

Guardiola rehat dulu. Meski kabarnya, beberapa timnas di dunia menginginkan Guardiola seperti Timnas Amerika Serikat.

Orobitg beri bocoran. Pep Guardiola mau kembali melatih dan keputusannya akan diambil pada musim panas 2027 mendatang, sebelum musim kompetisi baru dimulai!

"Pep baru akan membahas masa depannya secara resmi sebelum musim depan dimulai. Saat ini, dirinya belum memutuskan apa-apa," tutupnya. (dts/dam)

Pemprov Banten dan Kementrian PU Patungan Lebarkan Jalan Palima–Baros

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan skema pembiayaan bersama untuk pelebaran Jalan Nasional Jaksa Agung R. Soeprapto atau jalur Palima–Baros sepanjang sekitar 3,5 kilometer. Proyek tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas jalan, mengurai kemacetan, serta memperlancar mobilitas masyarakat Serang–Pandeglang.



Pelebaran jalan ini juga menjadi bagian dari persiapan infrastruktur Banten sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII Tahun 2032.

Komitmen kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo dan Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (19/11/2026).

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pelebaran jalur Palima–Baros menjadi kebutuhan mendesak karena ruas tersebut merupakan penghubung utama Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Selain menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari, jalan itu juga menjadi akses menuju kawasan Sports Center, termasuk Banten International Stadium.

Menurut Andra, pertumbuhan ekonomi yang

Baca PEMPROV ....Hal. 7

OLAHRAGA

DPRD Apresiasi Kota Tangerang Juara Umum FORPROV II



(IST)

Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri Septiawan Perman bersama para atlet.

TANGERANG | TRM

Keberhasilan kontingen Kota Tangerang mempertahankan gelar juara umum dalam Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (FORPROV) II Banten 2026 mendapat apresiasi dari DPRD Kota Tangerang.

Capaian tersebut dinilai menunjukkan perkembangan olahraga masyarakat di Kota Tangerang. Tidak hanya pada cabang olahraga prestasi, olahraga rekreasi juga semakin diminati dan berpotensi melahirkan pegiat olahraga berprestasi.

Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri Septiawan Permana, mengatakan keberhasilan Kota Tangerang menjadi juara umum semakin membanggakan karena daerah tersebut juga dipercaya sebagai tuan rumah FORPROV II Banten 2026.

Menurut Andri, keberhasilan penyelenggaraan sekaligus pencapaian juara umum merupakan hasil positif dari perkembangan olahraga masyarakat yang perlu terus didukung.

"Penutupan FORPROV 2026, di mana kita menjadi tuan rumah dan berhasil mendapatkan juara umum, merupakan sebuah prestasi yang patut kita apresiasi. Ini juga membuktikan bahwa geliat olahraga di Kota Tangerang tidak hanya olahraga prestasi, tetapi juga olahraga rekreasi yang saat ini terus meningkat. Tidak hanya digemari masyarakat, tetapi juga bisa ditingkatkan menjadi level prestasi," ujarnya seusai menghadiri penutupan FORPROV II Banten 2026 di Alun-Alun Ahmad Yani, Kota Tangerang, Selasa (10/11/2026).

Andri berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi para pegiat dan atlet olahraga masyarakat untuk terus meningkatkan kemampuan. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, semakin banyak atlet lokal diharapkan mampu mewakili Provinsi Banten dalam kompetisi tingkat nasional.

Selain mengapresiasi prestasi kontingen, Andri menilai keberhasilan penyelenggaraan FORPROV II Banten 2026 memperlihatkan besarnya potensi Kota Tangerang sebagai destinasi sports tourism atau wisata olahraga.

Menurut dia, Kota Tangerang memiliki pengalaman menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala regional maupun nasional. Beragam kegiatan tersebut mencakup agenda olahraga, musik, hingga kegiatan kreatif yang melibatkan masyarakat.

"Ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang juga bisa menjadi kota unggul seperti kota-kota metropolitan lainnya. Namun, yang paling penting adalah dukungan pemerintah bukan satu-satunya faktor. Masyarakat yang teredukasi dan memiliki kesadaran untuk mendukung kegiatan juga menjadi faktor kuat sehingga kita bisa menggelar acara pembukaan dan penutupan di tengah jantung Kota Tangerang," jelasnya.

Lebih lanjut, Andri mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara kegiatan, komunitas olahraga, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar olahraga masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan. (Hab)

DPRD Kota Tangerang Bahas Kenaikan TPP PPPK

PENYETARAAN IJAZAH 1.500 PEGAWAI BELUM JELAS



(IST)

PPPK Teknis Kota Tangerang bersama DPRD mengadakan RDP di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang, Kamis (19/11).

TANGERANG | TRM

DPRD Kota Tangerang membahas peluang kenaikan TPP PPPK dan pengakuan ijazah sekitar 1.500 pegawai teknis yang masih terkendala regulasi pusat.

TANGERANG | TRM

Persoalan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) teknis penuh waktu di Kota Tangerang kembali menjadi perhatian DPRD. Selain memperjuangkan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), para pegawai juga meminta pengakuan kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki.

Aspirasi tersebut disampaikan Forum PPPK Teknis Penuh Waktu dalam audiensi dengan DPRD Kota Tangerang di Ruang Badan Anggaran (Banggar), Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, forum menyampaikan empat tuntutan utama. Yakni, penyetaraan TPP PPPK dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), penerapan kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang tercatat dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN), moratorium seleksi CPNS di Kota Tangerang, serta pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan untuk memastikan tindak lanjut kesepakatan sebelumnya.

Ketua Forum PPPK Kota Tangerang, Jamiludin, mengatakan audiensi tersebut merupakan upaya meminta kepastian atas sejumlah aspirasi yang telah disampaikan dalam RDP pada 7 Agustus 2026.

Menurutnya, masih terdapat beberapa persoalan yang belum memperoleh jawaban konkret dari pemerintah daerah. Karena itu, forum meminta DPRD kembali memfasilitasi pertemuan dengan melibatkan jajaran eksekutif terkait.

"Kita ingin kepada dewan agar RDP lanjutan dilaksanakan. Karena poin-poin di RDP awal itu ada beberapa yang memang harus dijawab melalui RDP lanjutan," ujarnya.

Jamiludin berharap pertemuan berikutnya melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda), Bappeda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Salah satu persoalan yang paling disoroti forum adalah ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan ijazah yang dimiliki sejumlah PPPK teknis.

Jamiludin mencontohkan, terdapat pegawai yang memiliki ijazah sarjana (S1), tetapi kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam pengangkatannya justru SMA.

"Kami ingin dikembalikan lagi menjadi S1," tegasnya.

Ia menyebut persoalan tersebut dialami sekitar 1.500 PPPK teknis yang diangkat pada 2024. Menurutnya, kondisi serupa tidak dialami PPPK dari kalangan tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan.

Forum berharap pemerintah dapat menerapkan kualifikasi pendidikan sesuai ijazah dan data kepegawaian yang tercatat di BKN.

Selain pengakuan ijazah, forum juga memperjuangkan penyetaraan TPP PPPK dengan PNS. Mereka berharap kebijakan tersebut dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jamiludin mengatakan forum masih mengedepankan komunikasi dan audiensi untuk memperjuangkan tuntutan tersebut. Namun, apabila tidak ada perkembangan hingga 2027, pihaknya akan membahas langkah lanjutan bersama anggota forum.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Mochamad Pandu, mengatakan pihaknya telah menerima dan menampung seluruh tuntutan Forum PPPK Teknis.

Menurut Pandu, sebagian aspirasi telah diakomodasi sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah daerah. Namun, persoalan pengakuan ijazah masih menghadapi kendala karena berkaitan dengan regulasi dan kewenangan pemerintah pusat.

"Ada beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan karena kita terbentur regulasi. Itu bukan kewenangan kota, tetapi kewenangan di tingkat pusat, di Kemen-PAN-RB dan juga BKN," jelasnya.

Terkait pengakuan kualifikasi pendidikan, Pandu menyebut BKPSDM Kota Tangerang telah beberapa kali berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi.

Sementara itu, mengenai tuntutan kenaikan TPP, DPRD akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tim keuangan daerah guna membahas kemungkinan penyesuaian kebijakan.

Pembahasan tersebut akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, mengingat APBD Kota Tangerang saat ini menghadapi tekanan fiskal.

"Ke depan, kami akan berkoordinasi dengan TAPD dan tim keuangan daerah Kota Tangerang untuk merumuskan kebijakan ini. Kita lihat dulu kondisi keuangan. Kalau memang ada waktu yang tepat dan keuangan memungkinkan, insyaallah akan kita naikkan lagi," kata Pandu. (Hab)



DPRD Minta Pemkot Tangerang Evaluasi Drainase Tertutup

TANGERANG | TRM

Pemerintah Kota Tangerang didorong mengevaluasi sistem drainase tertutup atau U-Ditch sebagai bagian dari upaya mengantisipasi genangan dan banjir saat musim penghujan.

Anggota DPRD Kota Tangerang, Tasril Jamal, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan kajian terhadap penerapan sistem drainase tersebut. Pasalnya, saluran yang tertutup dinilai memiliki sejumlah kendala, terutama dalam proses pemeliharaan dan pembersihan sampah.

Menurut Tasril, bagian atas saluran drainase tertutup kerap dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas, mulai dari tempat berjualan hingga lokasi pembuangan sampah. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pengawasan dan menyulitkan petugas ketika harus membersihkan saluran.

Selain itu, tutup drainase yang memiliki bobot cukup berat membuat proses pengangkatan sampah dan endapan lumpur di dalam saluran tidak mudah dilakukan.

"Perlu dikaji dan dianalisis kembali sistem drainase tertutup ini. Ketika saluran sudah tertutup, proses pengangkatan sampah yang masuk ke dalamnya menjadi sulit. Karena itu, saya berharap PUPR dapat mengevaluasi sistem tersebut, termasuk mempertimbangkan pembuatan bak kontrol pada jarak tertentu agar kondisi drainase lebih mudah dipantau dan dibersihkan," ujar Tasril, Selasa (17/11/2026).



(IST)

Anggota DPRD Kota Tangerang, Tasril Jamal.

Selain mengevaluasi sistem drainase, Tasril mendorong Pemerintah Kota Tangerang bersama Pemerintah Provinsi Banten melakukan penyisiran sungai secara berkala.

Menurutnya, peninjauan langsung oleh kepala daerah dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diperlukan untuk mengetahui kondisi sungai sekaligus mengidentifikasi titik-titik yang membutuhkan penanganan.

Ia menilai normalisasi sungai melalui pengangkatan sedimentasi dan lumpur perlu dilakukan secara rutin. Langkah tersebut penting untuk menjaga kapasitas sungai agar mampu menampung dan mengalirkan debit air, terutama ketika intensitas hujan meningkat.

Tasril juga mengapresiasi langkah kepala daerah yang turun langsung meninjau kondisi sungai. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran nyata mengenai persoalan di lapangan.

"Penyisiran sungai ini sangat efektif karena pemerintah bisa melihat langsung kondisi di lapangan. Jika ditemukan pendangkalan, perlu dilakukan normalisasi atau pengangkatan lumpur. Ini penting agar aliran sungai tetap terjaga," paparnya.

Selain normalisasi, Tasril menyoroti kondisi tanggul sungai yang mengalami kebocoran. Ia meminta pemerintah melakukan pemeriksaan dan perbaikan agar tanggul tetap berfungsi dengan baik ketika debit air meningkat.

Tasril menegaskan, upaya mengantisipasi banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembenahan infrastruktur. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi faktor penting. (Hab)

Sachrudin Dukung Deklarasi Antitawuran Pelajar Banten

TANGERANG | TRM
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter, khususnya di kalangan generasi muda.

Salah satu fokusnya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan positif, serta bebas dari tawuran, kekerasan, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi.

Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menegaskan komitmen Pemkot Tangerang untuk mendukung kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat, terutama dalam pembinaan karakter pelajar. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademis, tetapi juga harus membentuk sikap, mental, dan perilaku generasi penerus bangsa.

Hal tersebut disampaikan Sachrudin usai memimpin Upacara Penutupan Deklarasi Pelajar Pancasila SMK, Antitawuran, Kekerasan, Perundungan, Diskriminasi, dan Intoleransi Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 di Lapangan Batalyon Infanteri PIK 203/Arya Kamuning, Jatiuwung, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Ketua DPRD Kota Tangerang, Kapolres, serta jajaran perangkat daerah terkait.

"Saya melihat kegiatan deklarasi ini sangat penting untuk mengubah sikap, mental, dan perilaku para pelajar, khususnya agar menjauhi tawuran dan berbagai tindakan negatif lainnya. Pak Gubernur juga terus mendorong dan memberikan perhatian kepada generasi penerus bangsa. Kami tentu sangat mendukung, bahkan Pemkot Tangerang juga memiliki program serupa yang akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk selalu selaras dengan kebijakan pemerintah di atasnya," ujar Sachrudin.

Ia berharap gerakan tersebut tidak berhenti sebatas deklarasi dan kegiatan seremonial, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Dengan demikian, para pelajar diharapkan tumbuh menjadi generasi yang disiplin, saling menghargai, serta mampu menyalurkan energi dan kreativitas melalui kegiatan positif dan produktif.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengajak seluruh pelajar untuk menolak segala bentuk tindakan negatif serta bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, damai, toleran, dan berprestasi.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak cukup hanya dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk bersekolah. Kualitas pembelajaran, pembentukan karakter, serta terciptanya suasana belajar yang kondusif juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.

"Tawuran, kekerasan, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi bukanlah perilaku pelajar yang berpendidikan. Keberanian bukan ditunjukkan dengan berkelahi, tetapi dengan berprestasi, menjaga persaudaraan, menghargai perbedaan, dan berani menolak tindakan negatif," tegas Andra.



Ia juga menekankan pentingnya menanamkan kembali nilai-nilai kedisiplinan dan kepemimpinan kepada pelajar agar tetap fokus pada tujuan utama menempuh pendidikan.

"Intinya adalah kita membangun dasar-dasar kedisiplinan dan kepemimpinan pada anak-anak. Dengan begitu banyaknya sarana yang rawan menggiring mereka ke berbagai perilaku negatif, sebagai antisipasi, harapannya kegiatan ini mampu mengembalikan fokus mereka pada tujuan bersekolah," jelasnya.

Sebagai informasi, kegiatan yang diinisiasi Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut berlangsung pada 16 hingga 18 November 2026. Kegiatan ini melibatkan 650 pelajar SMK se-Tangerang Raya. Sementara itu, pelajar dari wilayah lain di Provinsi Banten direncanakan mengikuti kegiatan serupa.

Melalui deklarasi tersebut, pemerintah berupaya memperkuat komitmen bersama dalam menanamkan nilai kedisiplinan, kepemimpinan, dan tanggung jawab di kalangan pelajar. Upaya ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda Banten yang religius, berkarakter, saling menghormati, dan berprestasi, sekaligus menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman dan nyaman untuk belajar serta mengembangkan potensi diri. (wil/dam)

627 Penerima Beasiswa Tangerang Gemilang dapat Pembekalan

TANGERANG | TRM
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelar kegiatan Pembekalan Penerima Beasiswa Tangerang Gemilang bagi Mahasiswa Aktif dan Mahasiswa Akhir Tahun Anggaran 2026 di Masjid Agung Al-Amjad, Tigaraksa, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 627 mahasiswa penerima manfaat yang terdiri dari 593 mahasiswa aktif dan 34 mahasiswa tingkat akhir.

Pada sambutannya, Bupati Tangerang, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang, Prima Saras Puspa, menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

"Pemerintah Kabupaten Tangerang menyadari betul bahwa investasi terbaik bagi masa depan daerah adalah investasi di bidang pendidikan. Melalui Program Beasiswa Tangerang Gemilang, pemerintah daerah hadir untuk memastikan bahwa putra-putri terbaik Kabupaten Tangerang mendapatkan dukungan nyata agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi dengan baik," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembekalan ini memiliki arti penting untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen serta memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab moral dan akademik para penerima manfaat. Ia pun berpesan agar para mahasiswa terus meningkatkan prestasi, menjaga disiplin dan pergaulan, serta menuntaskan pendidikan tepat waktu dengan kualitas terbaik.

"Setelah menyelesaikan studi nanti, jangan lupakan tanah kelahiran. Jadilah agen perubahan yang adaptif, kreatif, membawa inovasi serta siap mendedikasikan ilmu dan keahlian untuk membangun kemajuan serta kesejahteraan di Kabupaten Tangerang tercinta," pesannya.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa kegiatan pembekalan ini merupakan proses lanjutan penyaluran beasiswa sekaligus pengawasan agar bantuan dana pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel.

"Semoga dengan diterimanya Beasiswa Tangerang Gemilang ini membantu mereka dalam tahap pendidikan agar cepat selesai sesuai prioritasnya. Selain itu, beasiswa ini harus tepat sasaran, tepat penggunaan dan tertib dalam proses pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) agar tidak disalahgunakan," jelasnya.

Di sisi lain, antusiasme tinggi dirasakan oleh para penerima manfaat. Salah satu penerima beasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) angkatan 2023, Amelia Putri, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas perhatian Pemkab Tangerang melalui bantuan biaya hidup sebesar Rp9 juta tersebut. Ia pun berharap program Beasiswa Tangerang Gemilang dapat terus berlanjut sehingga kualitas SDM di Kabupaten Tangerang semakin maju dan berdaya saing di masa mendatang.

"Saya merasa sangat bahagia dan berterima kasih kepada Bapak Bupati beserta jajaran. Bantuan sebesar Rp9 juta ini sangat membantu kami untuk biaya transportasi, makan dan minum serta biaya kos. Selain bantuan materi, kami juga mendapat tambahan relasi dan wawasan karena bisa mengenal teman-teman dari berbagai kampus," ungkap Amelia.

Melalui kegiatan pembekalan ini, Pemkab Tangerang berharap para penerima Beasiswa Tangerang Gemilang tidak hanya terbantu secara finansial, tetapi juga semakin termotivasi untuk berprestasi, menjaga amanah, dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Pemkab Tangerang berkomitmen untuk terus menghadirkan program beasiswa yang tepat sasaran dan berkelanjutan sebagai upaya mencetak SDM unggul yang siap berkontribusi bagi kemajuan daerah. (dam)

Pemkot Tangerang Raih Penghargaan dari Kemenkes RI

TANGERANG | TRM
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) sebagai kota dengan Penanganan Ibu Hamil Bermasalah Kesehatan Terbaik Tahun 2026 wilayah Regional Barat.

Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, khususnya melalui deteksi dini dan penanganan kehamilan berisiko.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang dr. Dini Anggraeni menyatakan, pada 2026 Kota Tangerang memiliki sasaran sebanyak 36.820 ibu hamil. Hingga Oktober 2026, tercatat dua kasus kematian ibu.

"Data tersebut menjadi perhatian Dinas Kesehatan untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan komplikasi selama kehamilan, persalinan, hingga masa nifas," jelas dr. Dini, Kamis (19/11/26).

Dalam pelayanan Antenatal Care (ANC), setiap ibu hamil mendapatkan pemeriksaan dan skrining untuk mendeteksi faktor risiko maupun masalah kesehatan. Pemeriksaan tersebut meliputi skrining preeklampsia, anemia, serta triple eliminasi yang mencakup pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B.

"Berdasarkan data kesehatan ibu hamil Kota Tangerang tahun 2026, hasil skrining preeklampsia dengan risiko sedang dan berat tercatat sebesar 1,72 persen. Sementara itu, jumlah ibu hamil yang mengalami anemia ringan, sedang, hingga berat mencapai 5,15 persen," paparnya.

Ibu hamil yang teridentifikasi memiliki faktor risiko atau masalah kesehatan selanjutnya mendapatkan pemantauan lebih intensif dan penanganan sesuai kondisi klinis. Jika diperlukan, tenaga kesehatan juga melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan penanganan yang lebih tinggi.

"Untuk meningkatkan kualitas layanan, Pemkot Tangerang melalui Dinas Kesehatan memperkuat deteksi dini melalui pemeriksaan kehamilan berkualitas. Setiap ibu hamil didorong melakukan pemeriksaan minimal enam kali selama masa kehamilan, termasuk skrining preeklampsia, anemia, dan triple eliminasi," katanya.

Selain itu, penguatan kapasitas puskesmas terus dilakukan melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan ANC, pemeriksaan ultrasonografi (USG), dan penanganan kegawatdaruratan. Upaya tersebut juga didukung dengan pemenuhan ketersediaan obat, alat kesehatan, serta penguatan sistem rujukan.

Pemkot Tangerang turut mengoptimalkan layanan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). Penguatan layanan ini menjadi bagian penting dalam penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan, terutama pada kasus preeklampsia dan perdarahan pascapersalinan.

"Upaya lainnya dilakukan melalui kolaborasi lintas program dan lintas sektor, pemantauan ibu hamil berisiko dengan melibatkan Kader Srikandi (Sedari Dini Kawal Ibu Hamil dan Bayi), serta audit kasus kematian ibu untuk mengidentifikasi penyebab dan menyusun rekomendasi tindak lanjut," pungkasnya. (wil/dam)

KEGIATAN

Pemkot Tangerang Apresiasi Kontribusi Tangerang City Innovation Awards

TANGERANG | TRM
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak di momen Tangerang City Innovation Award 2026.

Wali Kota Tangerang Sachrudin menuturkan, penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada sejumlah pihak yang telah berkontribusi menyumbangkan ide dan inovasi pembangunan yang akan diterapkan di Kota Tangerang.

Penghargaan tersebut diberikan kepada akademisi, mahasiswa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sampai pegiat kampung tematik dari kalangan masyarakat umum.

"Kami terus memberikan ruang bagi semua lapisan masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan termasuk menyumbangkan ide dan inovasi menarik seperti di bidang ekonomi, pangan, sampai sarana dan prasarana yang bisa diterapkan di Kota Tangerang," ujar Sachrudin di Puspem Kota Tangerang, Kamis (19/11/26).

Di momen sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Yeti Rohaeti menambahkan, tingkat partisipasi akademisi, mahasiswa, sampai masyarakat dalam penjaringan ide dan inovasi pembangunan terus bertambah setiap tahunnya.

Tercatat terdapat 63 akademisi dan 80 kelompok mahasiswa dari 33 perguruan tinggi se-Indonesia turut berpartisipasi menyumbangkan ide dan inovasi pembangunan di ajang Lomba Karya Tulis Imiah (LKTI) dan Lomba Pra-Start Up Inovasi yang menjadi bagian dari Tangerang City Innovation Award 2026.

"Alhamdulillah partisipasi para akademisi di ajang perlombaan LKTI terus meningkat bahkan tahun ini pertama kali diadakan khusus mahasiswa untuk berkontribusi langsung menyumbangkan ide dan inovasinya bagi pembangunan di Kota Tangerang," ujarnya. (wil/dam)

Kenalkan Kekayaan Budaya Lokal, Kirab Budaya Siap Meriahkan Benteng Culture Fest

TANGERANG | TRM
Kekayaan seni dan budaya lokal akan menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran Benteng Culture Fest 2026. Melalui agenda kirab budaya, masyarakat diajak untuk mengenal lebih dekat keberagaman tradisi, kesenian, dan identitas budaya yang tumbuh di Kota Tangerang.

Kirab budaya tersebut menjadi bagian dari rangkaian Benteng Culture Fest 2026 yang berlangsung pada 20-22 November 2026 di Taman Elektrik, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang, Boyke Urif Hermawan, menyampaikan bahwa Benteng Culture Fest 2026 menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya yang dapat dinikmati masyarakat. Salah satunya melalui kirab budaya yang menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada khalayak luas.

"Tidak hanya menjadi tontonan, kirab budaya juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan dan menjaga keberagaman tradisi agar tetap dikenal oleh generasi muda. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan ketertarikan masyarakat untuk mengenal, mengapresiasi, serta turut melestarikan warisan budaya daerah," papar Boyke, Kamis (19/11/26).

Selain kirab budaya, pengunjung juga dapat menikmati berbagai agenda lainnya, seperti talkshow kebudayaan, screening film dokumenter, bedah buku, pameran buku, dan Heritage Corner Exhibition. (wil/dam)

TANGERANG RAYA Media
THE LEADER OF POLITICAL NEWS IN BANTEN
Diterbitkan oleh:
PT. MEDIA TANGERANG RAYA
0199/PM/III/BPMPTSP/2016
KOMISARIS : FUAD
DIREKTUR UTAMA : HELMY HALIM
DIREKTUR : RUDI LESTIAWAN

PIMPINAN UMUM: HELMY HALIM WAKIL PIMPINAN UMUM : DAHLAN MUHAMMAD PIMPINAN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: HADIST ABDILLAH PIMPINAN PERUSAHAAN : WILKI IRAWAN REDAKTUR PELAKSANA: MUSTOPA ADAM REDAKTUR : B.PRACAHYO, C.PURNOMO SEKRETARIS REDAKSI : ISIKA HAURA BILQIS MANAGER KEUANGAN: ZIMA NURAINI MANAGER IKLAN : SYAFINA AZZAHRA MANAGER PEMASARAN: SUHENDRA MANAGER UMUM : FRANCISE CAROLIN LAYOUT: LUKMAN, BOBY KA. BIRO BANTEN : HEDY KA. BIRO TANGSEL : ABDUL HARIS KA. BIRO LEBAK: MUKHTAR KA. BIRO PANDEGLANG : IYAN KA. BIRO PENDIDIKAN: SIHOE HOERUDIN WARTAWAN : AGUS IRAWAN, SITI MARQO, JULY RABHIATY, R.A. SUDRAJAD, SYARIF HIDAYAT, IRWANI HERLIAWAN, ADITYAWARMAN, ABIDIN, ACENG ABIDIN, DEDY, ROBI LIU, PRAYITNO, EDY ST, RIVAN MAJID REZA B, MURJIMAN, HASURI, MOH. RAFIYUDI, ABDUL AZIZ, MUHAMMAD RIKO ADAMMULLOH, ABDUL HARIS, ROFI'U DAROJAT, RATU IKHDA PUSPITA BAGIAN SIRKULASI: AGUS BLACK,SAUNAN, HERRY, JUNIOR BAGIAN MARKETING/PROMOSI: YULI NOVALIA, INDRIANADA BAGIAN IKLAN: P. ADI, JUNAEDI, MUKSIN BAGIAN PAJAK : ZAJRA F BAGIAN ADM.UMUM : SISCA OFFICE BOY (OB): WAWAN HASAN PENASEHAT HUKUM: HANAFI TANAWUAYA, SH, MH, DEDDY SURYADI, SH, BUDI KASAN BESARI, SH CLA, UJANG SUHARJA, SH.
REDAKSI DAN TATA USAHA : Ruko Modernland Blok R no.30 Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang. TELPON : 59728637 EMAIL: tangerangraya@yahoo.co.id
REKENING PERUSAHAAN : Rekening BJB 0069985653001 a/n PT. MEDIA TANGERANG RAYA dan Rekening Bank Banten 0712001828 a/n PT. Media Tangerang Raya. TARIF IKLAN: Display Rp.45.000,-/mmk FC. Rp.25.000,-/mmk BW, Iklan Baris Rp. 4.500,-/baris.

EDUKASI

Disdik Kota Tangerang Soroti Kekerasan Seksual



(IST)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar.

TANGERANG | TRM

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tangerang menyoroti berbagai persoalan yang berpotensi mengancam keamanan lingkungan pendidikan, mulai dari perundungan (bullying), tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, hingga kekerasan seksual.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan dan evaluasi internal di seluruh satuan pendidikan guna mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap siswa.

Menurut Wahyudi, persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus ditangani secara serius. Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh penyelenggara pendidikan.

Hal itu disampaikan Wahyudi saat memberikan sambutan dalam acara pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Tangerang periode 2026–2031 di Soll Marina Hotel, Jatiuwung, Kamis (19/11/2026).

Ia menegaskan, persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan tidak boleh ditutup-tutupi, baik yang terjadi di sekolah negeri maupun swasta.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memberikan perhatian dan perlindungan secara adil kepada seluruh warga sekolah. Perlindungan tidak hanya ditujukan kepada tenaga pendidik, tetapi juga harus memastikan keselamatan dan hak-hak siswa terpenuhi.

Karena itu, pengawasan terhadap aktivitas di lingkungan sekolah perlu diperkuat. Evaluasi internal juga harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi persoalan sekaligus mencegah terulangnya kasus kekerasan.

Wahyudi menilai sekolah seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak untuk belajar, mengembangkan kemampuan, serta membangun karakter.

Namun, munculnya berbagai persoalan seperti perundungan, tawuran, dan kekerasan seksual menunjukkan perlunya perhatian lebih serius dari seluruh pihak. (Hab)

SMK IPTEK Muncul Diedukasi soal Bahaya Tawuran dan Narkoba



(PGRI KECAMATAN SUKADIRI)

PGRI Kecamatan Sukadiri meriahkan HUT ke-81 PGRI dan HGN 2026 dengan aneka lomba hingga jalan sehat.

TANGERANG SELATAN | TRM

Polres Tangerang Selatan (Tangsel) memperkuat upaya pencegahan kenakalan remaja melalui edukasi langsung ke lingkungan sekolah. Kali ini, kegiatan menyasar siswa dan siswi SMK IPTEK Muncul, Kecamatan Setu, melalui program Polisi Peduli Pendidikan, Senin (16/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Tangsel AKBP Boy Jumalolo memberikan pembinaan kepada para pelajar. Materi yang disampaikan mencakup bahaya penyalahgunaan narkoba, aksi tawuran antarpelajar, kenakalan remaja, serta pentingnya memahami dan menaati aturan hukum.

Edukasi ini menjadi bagian dari langkah preventif kepolisian untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Melalui pemahaman tersebut, siswa diharapkan mampu mengenali risiko perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kapolres Tangsel AKBP Boy Jumalolo hadir didampingi Wakapolres Tangsel Kompol Muchammad Tri Yandi Permana dan Kapolsek Cisauk AKP Agus Riyanto.

Program Polisi Peduli Pendidikan juga menjadi sarana bagi kepolisian untuk membangun komunikasi dengan lingkungan sekolah. Pendekatan langsung kepada pelajar diharapkan dapat mendukung terciptanya suasana belajar yang aman dan kondusif.

Melalui kegiatan pembinaan tersebut, Polres Tangsel mendorong para siswa agar lebih bertanggung jawab dalam pergaulan, memahami aturan, serta berperan positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (Hab)

SMA se-Banten Bakal Digembleng di Barak TNI

DIIKUTI LEBIH DARI 1.000 PELAJAR PADA DESEMBER 2026

TANGERANG | TRM
Dindikbud Banten menyiapkan pembinaan lebih dari 1.000 pelajar SMA selama tiga hari di Yonif 203 Tangerang pada Desember 2026. Fokus pada karakter dan kepemimpinan.



(IST)

Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Jamaludin.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menyiapkan program pembinaan karakter bagi lebih dari 1.000 pelajar SMA negeri dan swasta se-Banten pada Desember 2026.

Program tersebut akan berlangsung selama tiga hari di Markas Batalyon Infanteri (Yonif) Mekanis 203/Arya Kemuning, Jatiuwung, Kota Tangerang. Kegiatan ini merupakan kelanjutan program pembinaan pelajar yang sebelumnya telah dilaksanakan bagi siswa jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK).

Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Jamaludin, mengatakan program pembinaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat karakter peserta didik sekaligus mencegah berbagai persoalan di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, pembinaan dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan, tawuran, perundungan, diskriminasi, maupun intoleransi.

Program tersebut juga menjadi bagian dari implementasi kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026.

Selain penguatan karakter, kegiatan ini mengintegrasikan program pembiasaan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat.

"Program sekolah gratis bukan hanya memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan, pembentukan karakter, serta terwujudnya lingkungan sekolah yang aman dan kondusif bagi seluruh peserta didik," ujar Jamaludin, Rabu (18/11/2026).

Jamaludin menjelaskan, peserta pembinaan berasal dari berbagai latar belakang. Mereka merupakan gabungan pelajar yang aktif dalam organisasi sekolah dan siswa yang membutuhkan pendampingan khusus.

Pelajar yang aktif dalam organisasi OSIS, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan Pramuka akan dilibatkan bersama siswa yang memerlukan pembinaan dalam aspek perilaku, kedisiplinan, serta interaksi sosial.

Menurut Jamaludin, komposisi peserta tersebut sengaja dirancang agar tercipta interaksi positif antarpelajar. Siswa yang aktif dalam organisasi diharapkan dapat menjadi teladan dan mendorong terbentuknya budaya positif di lingkungan sekolah.

"Kita berharap dapat membentuk kader pelajar yang mampu menjadi teladan, penggerak, dan pelopor budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing," katanya.

Dindikbud Banten akan menerapkan pola pembinaan serupa dengan kegiatan yang sebelumnya diberikan kepada siswa SMK negeri dan swasta se-Banten.

Selama tiga hari, peserta akan mendapatkan materi pembinaan mental, kedisiplinan, dan latihan dasar kepemimpinan. Materi lainnya mencakup penanaman nilai-nilai bela negara, semangat persatuan, solidaritas, kesadaran hukum, serta penguatan karakter.

Jamaludin menyebutkan, program pembinaan sebelumnya diikuti 650 siswa SMK yang merupakan perwakilan dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Banten.

Untuk jenjang SMA, jumlah peserta direncanakan lebih banyak, yakni melampaui 1.000 pelajar.

Melalui program pembinaan tersebut, Dindikbud Banten berharap kesadaran kolektif pelajar semakin meningkat. Pemerintah juga berharap kegiatan ini dapat membantu menekan potensi kenakalan remaja sekaligus membentuk generasi muda yang religius, berkarakter, memiliki rasa tanggung jawab, dan berprestasi.

Program ini menjadi salah satu upaya Pemprov Banten dalam memperkuat pendidikan karakter yang berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah. (Hab)

Kepala SMPN 1 Sepatan Raih Juara 1 Kepala Sekolah Transformatif Kabupaten Tangerang 2026

TANGERANG | TRM

Prestasi membanggakan diraih Kepala SMP Negeri 1 Sepatan, Rizki Amalia, M.Pd. Ia berhasil meraih Juara 1 Lomba Kepala Sekolah Transformatif tingkat Kabupaten Tangerang dalam ajang Lomba Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi, kreativitas, dan inovasi Rizki Amalia dalam mengembangkan kualitas pendidikan di sekolah yang dipimpinnya.

Selain menjabat sebagai Kepala SMPN 1 Sepatan, Rizki juga dipercaya mengemban tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMP Negeri 1 Sukadiri.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai gagasan dan karya inovatif yang dikembangkan dalam bentuk tulisan maupun presentasi audiovisual. Karya-



(SMPN 1 SUKADIRI)

Rizki Amalia, M.Pd., Kepala SMPN 1 Sepatan sekaligus Plt Kepala SMPN 1 Sukadiri meraih Juara 1 Lomba Kepala Sekolah Transformatif Tingkat Kabupaten Tangerang.

karya tersebut dinilai mampu menggambarkan upaya transformasi kepemimpinan serta mendorong perubahan positif bagi kemajuan institusi pendidikan.

Prestasi ini sekaligus menjadi pengakuan atas komitmen Rizki dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan di dua satuan pendidikan.

Keberhasilan Rizki Amalia mendapat sambutan positif dari kalangan tenaga pendidik. Yuliana, salah seorang guru SMPN 1 Sukadiri, menyampaikan rasa bangga atas penghargaan yang diraih kepala sekolahnya tersebut.

Ia menilai pencapaian itu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi para guru untuk terus meningkatkan kualitas dan mengembangkan inovasi dalam dunia pendidikan.

"Selamat Ibu atas diraihnya prestasi yang luar biasa ini," ujar Yuliana mewakili rekan-rekan guru.

Menurutnya, prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi tenaga pendidik lainnya, khususnya dalam membangun budaya kerja yang kreatif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Penghargaan sebagai Kepala Sekolah Transformatif menjadi momentum untuk terus memperkuat inovasi dan kepemimpinan di lingkungan sekolah.

Kepemimpinan yang adaptif dan inspiratif dinilai memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi, tetapi juga dituntut mampu menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan mendorong pengembangan kompetensi guru serta peserta didik.

Melalui prestasi tersebut, Rizki Amalia diharapkan terus mengembangkan berbagai terobosan dalam pengelolaan sekolah, baik di SMPN 1 Sepatan maupun SMPN 1 Sukadiri.

Capaian ini juga diharapkan menjadi penyemangat bagi para kepala sekolah dan tenaga pendidik lainnya di Kabupaten Tangerang untuk terus berinovasi, meningkatkan profesionalisme, serta berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas. (Hab)

180 Siswa SDN Gandasari I Kota Tangerang Ikuti Imunisasi BIAS

TANGERANG | TRM

Sebanyak 180 siswa SDN Gandasari I, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, mengikuti program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini digelar melalui kerja sama pihak sekolah dengan tenaga kesehatan Puskesmas Manis Jaya.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala SDN Gandasari I, Musyarifah, mengatakan imunisasi tersebut menyasar siswa kelas 1, 2, dan 5. Sejak pagi, para siswa mengikuti kegiatan dengan tertib dan didampingi guru masing-masing.

"Alhamdulillah, hari ini pelaksanaan BIAS di SDN Gandasari I berjalan dengan lancar. Sebanyak 180 peserta didik dari kelas 1, 2, dan 5 yang menjadi sasaran imunisasi bekerja sama dengan petugas dari Puskesmas Manis Jaya," kata Musyarifah.

Ia mengapresiasi dukungan dan pendampingan tenaga kesehatan Puskesmas Manis Jaya. Menurutnya, imunisasi merupakan langkah pencegahan untuk membantu melindungi anak-anak dari penyakit menular.

Sebelum imunisasi diberikan, petugas medis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan singkat. Para siswa juga mendapatkan penjelasan agar lebih tenang saat mengikuti proses imunisasi.

Pihak sekolah, lanjut Musyarifah, telah menyosialisasikan kegiatan tersebut kepada orang tua murid. Sosialisasi dilakukan untuk memastikan orang tua mengetahui pelaksanaan program serta memberikan izin bagi anak-anak yang menjadi sasaran imunisasi.

Musyarifah menjelaskan, pelaksanaan BIAS pada November umumnya mencakup pemberian vaksin Difteri Tetanus (DT) bagi siswa kelas 1, serta Tetanus Difteri (Td) untuk siswa kelas 2 dan kelas 5.

Ia menegaskan, sekolah mendukung pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan dan akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang serta Puskesmas Manis Jaya.

"Harapannya, dengan imunisasi yang lengkap, anak-



(ST)

Siswa SDN Gandasari I tengah dilakukan imunisasi dalam kegiatan program BIAS yang dilaksanakan.

anak memiliki kekebalan tubuh yang optimal sehingga mereka bisa tumbuh sehat, bugar, dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan maksimal," pungkasnya. (Hab)

Penolakan Pemindahan Badak Jawa Meluas

BUPATI PANDEGLANG DESAK PEMERINTAH BUKA KAJIAN

PANDEGLANG | TRM
Bupati Pandeglang dan warga Ujung Kulon menolak pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo tanpa kajian ilmiah komprehensif. Mereka meminta habitat asli tetap menjadi prioritas konservasi.


Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani. (IST)

Wacana pemindahan atau translokasi sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo (TNAP), Banyuwangi, Jawa Timur, mendapat penolakan dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menegaskan, pemindahan satwa langka endemik tersebut tidak boleh dilakukan tanpa didahului kajian ilmiah yang komprehensif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Dewi, penguatan habitat asli Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon harus tetap menjadi prioritas utama dalam strategi konservasi nasional.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang, kata dia, menghormati dan mendukung upaya pelestarian yang dilakukan pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan, serta Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Namun, keputusan memindahkan satwa bercula satu itu harus didasarkan pada kajian ilmiah, bukan semata-mata asumsi mengenai risiko di habitat asalnya.

"TNUK telah terbukti menjadi habitat alami terakhir yang mampu mempertahankan populasi Badak Jawa berkat sinergi antara para ranger, peneliti, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan strategis apa pun, Pemerintah Pusat diminta melakukan kajian menyeluruh dan terbuka yang mencakup lima aspek krusial," kata Dewi, Selasa (17/11/2026).

Lima aspek yang dimaksud meliputi kajian ekologi dan habitat, genetik dan populasi, kesiapan sosial dan pengamanan, risiko kesehatan dan translokasi, serta sejarah dan budaya.

Pada aspek ekologi dan habitat, pemerintah perlu mengukur kesesuaian daya dukung lingkungan, ketersediaan pakan dan sumber air, luas wilayah jelajah, serta ancaman penyakit di Taman Nasional Alas Purwo dibandingkan dengan kondisi habitat Badak Jawa di Ujung Kulon.

Aspek kedua menyangkut kajian genetik dan populasi. Analisis diperlukan untuk mengetahui dampak pemindahan terhadap struktur genetik populasi Badak Jawa yang jumlahnya sangat terbatas, termasuk risiko perkawinan sedarah (inbreeding), tingkat stres, dan potensi keberhasilan adaptasi di habitat baru.

Selanjutnya, pemerintah harus memastikan kesiapan sosial dan sistem pengamanan di kawasan tujuan. Hal ini mencakup kesiapan masyarakat sekitar Alas Purwo, antisipasi konflik manusia dan satwa, perlindungan dari perburuan liar, serta ketersediaan sumber daya manusia dan pendanaan jangka panjang.

Kajian keempat berkaitan dengan risiko kesehatan dan proses translokasi. Pemerintah perlu memetakan potensi penularan penyakit antarpopulasi, risiko kegagalan pemindahan, hingga menyiapkan protokol mitigasi darurat apabila proses translokasi tidak berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, aspek sejarah dan budaya perlu diperhitungkan karena Badak Jawa telah menjadi bagian dari identitas ekologis, warisan budaya, dan kebanggaan masyarakat Pandeglang serta Provinsi Banten.

Dewi juga meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, mulai dari penyusunan kajian hingga pelaksanaan uji publik.

"Pemkab Pandeglang mendesak Pemerintah Pusat untuk melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal secara aktif dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, mulai dari penyusunan kajian hingga uji publik. Masyarakat Pandeglang dinilai memiliki hak untuk didengar karena selama ini berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian ekosistem Ujung Kulon," katanya. (Hab)

PEMERINTAHAN

Wabup Lebak Ajak Pelajar SMAN 1 Cibadak Perangi Narkoba


(IST)

Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menghadiri kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi pelajar di SMAN 1 Cibadak.

LEBAK | TRM
Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengajak para pelajar menjauhi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kalangan pelajar dinilai menjadi salah satu kelompok yang rentan menjadi sasaran jaringan peredaran narkoba.

Ajakan tersebut disampaikan Amir saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi pelajar di SMAN 1 Cibadak, Kabupaten Lebak, Kamis (19/11/2026).

Amir menegaskan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda. Karena itu, upaya pencegahan membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, hingga masyarakat.

Menurutnya, pelajar harus mampu menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan dan memiliki tekad kuat untuk meraih cita-cita.

"Para pelajar harus memiliki cita-cita dan semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jangan sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak masa depan. Jadilah generasi muda yang berprestasi, berkarakter, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah maupun bangsa," ujar Amir.

Dia berharap, melalui sosialisasi P4GN, para pelajar semakin memahami bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika. Edukasi tersebut juga diharapkan membangun keberanian untuk menolak segala bentuk ajakan menggunakan maupun terlibat dalam peredaran gelap narkoba. (Hab)

DPRD Panggil Kepala BKPSDM

PANDEGLANG | TRM
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menyoroti lambannya pengisian jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. DPRD berencana memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pandeglang, Didin Pahrudin, untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.


Wakil Ketua III DPRD Pandeglang, M.M. Fuhaira Amin. (IST)

Wakil Ketua III DPRD Pandeglang, M.M. Fuhaira Amin, mengatakan pemanggilan itu dilakukan menyusul masih banyaknya jabatan yang belum terisi pejabat definitif. Kekosongan tersebut terjadi mulai dari jabatan eselon IV, eselon III, hingga eselon II.

Sejumlah posisi strategis yang belum terisi antara lain kepala organisasi perangkat daerah (OPD), asisten daerah (Asda), dan staf ahli bupati.

Menurut Fuhaira, kondisi tersebut perlu segera ditangani karena berpotensi menghambat kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Terlebih, sejumlah jabatan kosong berkaitan langsung dengan sektor pelayanan masyarakat dan optimalisasi pendapatan daerah.

Dia mencontohkan kekosongan posisi Kepala Seksi (Kasi) Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekretaris kecamatan (Sekmat), hingga kepala satuan pendidikan.

"Jabatan kosong ini harus segera diisi karena sangat berpengaruh terhadap kinerja. Contohnya kekosongan Kasi PAD yang berdampak pada pengelolaan Buku 2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," tegas Fuhaira, Kamis (19/11/2026).

Selain sektor pendapatan daerah, persoalan kekosongan jabatan juga terjadi di bidang pendidikan. Fuhaira menyebutkan, sekitar 15 posisi kepala sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Pandeglang hingga kini belum terisi.

Politikus yang memiliki latar belakang sebagai mantan birokrat tersebut juga mempertanyakan konsistensi alasan Pemkab Pandeglang terkait lambannya proses rotasi dan promosi jabatan.

Menurutnya, alasan yang disampaikan pemerintah daerah terkesan berubah setiap kali DPRD mendesak agar pengisian jabatan segera dilakukan.

"Waktu zaman Pak Kabid Furkon kendalanya disebut karena aplikasi I-Mut (Integrated Mutasi). Kemarin alasannya harus melalui Uji Kompetensi (Ukom), nah, sekarang apa lagi? Saya ingin tahu apa lagi alasannya kali ini," katanya.

Fuhaira menegaskan, rencana pemanggilan Kepala BKPSDM merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pihaknya mengaku terus memantau kondisi birokrasi sekaligus menyerap keluhan dan aspirasi dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Pandeglang.

Dia menilai, lambannya pengisian jabatan tidak hanya berpotensi menghambat roda pemerintahan, tetapi juga memengaruhi motivasi pegawai yang telah lama mengabdi.

Fuhaira menyebutkan, DPRD sebenarnya telah berulang kali mendesak Pemkab Pandeglang agar menuntaskan persoalan kekosongan jabatan sejak tahun lalu. Namun, hingga kini realisasinya dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti.

"Jangan sampai birokrat ASN kelihatan mati suri. Pengisian dan promosi jabatan ini adalah bentuk apresiasi nyata pemerintah atas pengabdian mereka. Saya ikut berempati atas kegelisahan para ASN karena saya dulu pernah menjadi birokrat," tuturnya. (Hab)

Hasbi Ajak IDI Bersinergi Tingkatkan Layanan Kesehatan di Lebak

LEBAK | TRM
Bupati Lebak Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurut Hasbi, peningkatan layanan kesehatan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, organisasi profesi, tenaga medis, hingga pengelola fasilitas pelayanan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Hasbi saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 IDI yang diselenggarakan IDI Cabang Lebak di Hotel Grand Keisha, Kamis (19/11/2026).

"Kami berharap IDI Kabupaten Lebak terus berkontribusi secara profesional dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat," ujar Hasbi.

Dia menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama untuk menjawab berbagai tantangan sektor kesehatan, termasuk pemerataan akses pelayanan bagi masyarakat.

Karena itu, Pemkab Lebak berharap IDI dapat terus mengambil peran strategis dalam pembangunan kesehatan, terutama melalui peningkatan kompetensi dokter dan penguatan koordinasi dengan seluruh pihak terkait.

Sementara itu, Ketua IDI Kabupaten Lebak dr. Irfan Maulani menyatakan kesiapan organisasinya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dinas Kesehatan, organisasi profesi, rumah sakit, hingga puskesmas.

Menurut Irfan, luas wilayah Kabupaten Lebak dengan kondisi geografis dan aksesibilitas yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, pembangunan sektor kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan peran dokter atau IDI. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

"Kami senantiasa berkomitmen untuk membangun dan memberikan pelayanan kesehatan demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kami juga terus memperbarui ilmu pengetahuan dan memperkuat kompetensi para dokter anggota IDI di tengah perubahan zaman," kata Irfan.



Bupati Lebak Hasbi Jayabaya menghadiri puncak peringatan HUT ke-76 IDI yang diselenggarakan IDI Cabang Lebak.

Dalam rangkaian peringatan HUT ke-76, IDI Cabang Lebak juga menggelar sejumlah kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi pembagian paket kepada pasien kelas III di RSUD Adjidarmo, RSUD Misi, dan RSUD Kartini. Selain itu, IDI Lebak memberikan santunan kepada 50 anak yatim. Tidak hanya kegiatan sosial, IDI Lebak juga memberikan apresiasi kepada sejumlah dokter yang telah mengabdikan diri selama 20 tahun di Kabupaten Lebak. (Hab)



KRIMINALITAS

Pemegang Kartu Pas Bandara Soetja Jadi Tersangka



Barang bukti 150 ribu benih lobster. (IST)

TANGERANG | TRM

Polisi membongkar dugaan jaringan penyelundupan 180.000 ekor benih bening lobster (BBL) yang hendak dikirim ke Batam melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.

Dalam kasus yang ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp5,4 miliar tersebut, Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Salah satunya merupakan pemegang kartu pas bandara.

Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Handrio Wicaksono mengatakan, ketiga tersangka masing-masing berinisial AAM (27), MDP (29), dan MII (31).

Pengungkapan kasus ini bermula dari temuan dua koper berisi benih lobster oleh petugas Aviation Security (Avsec) bersama Balai Karantina Banten di Terminal 2 keberangkatan domestik pada Jumat, 13 November 2026.(Hab)

Update! Kronologi Pembunuhan Pengamen Ondel-Ondel

PELAKU MERUPAKAN TEMAN KERJA DITANGKAP DI PINANG

TANGERANG | TRM
Pengamen ondel-ondel di Pinang, Kota Tangerang, tewas dibunuh rekan sesama pengamen. Perselisihan bermula dari uang Rp500 ribu yang hilang.



(IST)

Jenazah D ditemukan di pinggir Jalan Tol Tangerang-Jakarta, Kampung Sawah Dalam, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Perselisihan terkait uang Rp500 ribu berujung tragis bagi seorang pengamen ondel-ondel berinisial DS (31). Korban tewas setelah diduga dibunuh oleh rekan sesama pengamen berinisial MA (18) di wilayah Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten.

Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Gunawan menjelaskan, peristiwa tersebut bermula ketika MA diduga mengambil tas milik DS saat korban sedang tertidur di sebuah bale di depan rumah kontrakan milik seorang saksi, Senin (16/11/2026) sekitar pukul 12.30 WIB.

Tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp500 ribu. Setelah terbangun dan mengetahui tasnya hilang, DS kemudian meminta penjelasan kepada MA yang dicurigainya mengambil barang tersebut.

MA sempat mengembalikan tas milik korban. Namun, uang yang berada di dalamnya sudah tidak ada.

"Pelaku mengambil tas milik korban yang berisikan uang Rp500.000," kata Gunawan kepada Kompas.com, Rabu (18/11/2026). Untuk menyelesaikan persoalan itu, keduanya sepakat bertemu kembali di lokasi yang sama pada Selasa (17/11/2026) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB.

Namun, pertemuan tersebut justru berujung pertengkaran. Menurut keterangan kepolisian, perselisihan semakin memanas hingga terjadi perkelahian antara keduanya.

MA diduga kemudian melakukan kekerasan terhadap DS hingga korban meninggal dunia. Setelah itu, pelaku memindahkan jasad korban dari lokasi kejadian ke area pinggir Jalan Tol Tangerang-Merak, dengan jarak sekitar 300 meter.

"Setelah dipastikan tidak bergerak, korban diseret dari saung ke pinggir tol kurang lebih 300 meter dan mayat korban diletakkan di pinggir pagar dekat jalan tol, kemudian pelaku meninggalkan korban," ujar Gunawan.

Jasad DS ditemukan warga pada Rabu (18/11/2026) siang di Kampung Sawah Dalam, RT 05/04, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Sebelum penemuan tersebut, seorang saksi mengaku sempat mendengar suara keributan di sekitar belakang rumah kontrakannya pada Selasa dini hari.

Gunawan mengatakan, informasi mengenai suara keributan itu turut didalami penyidik untuk mengungkap rangkaian kejadian sebelum korban ditemukan meninggal dunia.

Warga yang menemukan jasad korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT dan kepolisian. Petugas Polsek Pinang bersama Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota selanjutnya mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. (Hab)

FORUM .....Sambungan Hal. 1

"Legalisasi tanah saja tidak cukup. Setelah masyarakat mendapatkan kepastian hak, harus ada upaya agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai ekonomi," paparnya.

Nailul juga mengingatkan bahwa ketidakpastian hukum pertanahan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar daripada nilai tanah yang sedang disengketakan.

Tanah yang tidak dapat dimanfaatkan akibat konflik kepemilikan berpotensi menghambat pembangunan, kegiatan usaha, dan investasi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja serta aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Pemerintah pun berpotensi kehilangan penerimaan dari kegiatan ekonomi yang tidak terlaksana. Karena itu, penyelesaian konflik pertanahan tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan administratif, melainkan bagian penting dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat.

Tiga Pilar Tata Kelola Pertanahan

Perspektif lain disampaikan anggota Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin. Ia menilai persoalan pertanahan harus dilihat dari sudut pandang hak dasar manusia dan keadilan dalam penguasaan sumber daya.

Menurut Iwan, tanah berkaitan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari tempat tinggal, pangan hingga keberlanjutan lingkungan hidup.

"Tanah itu merupakan fondasi hak-hak dasar manusia. Ada hak atas tempat tinggal, hak atas pangan, dan juga hak atas lingkungan hidup. Karena itu, persoalan tanah tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan administrasi atau komoditas ekonomi," ujarnya.

Iwan menjelaskan, terdapat tiga pilar penting dalam tata kelola pertanahan, yakni kepastian hak, keadilan dalam struktur penguasaan tanah, serta pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.

Kepastian hak, lanjutnya, tidak cukup hanya ditandai dengan kepemilikan sertifikat. Negara harus memastikan objek tanah, subjek pemegang hak, batas bidang, serta riwayat perolehan dan penguasaannya dapat ditelusuri secara jelas.

Ia juga menyoroti lemahnya integrasi data pertanahan, tata ruang, dan perizinan. Data yang tersebar di berbagai lembaga dan tidak saling terhubung berpotensi membuka ruang terjadinya tumpang tindih klaim maupun ketidakjelasan status tanah.

Selain itu, pembenahan kelembagaan dinilai mendesak dilakukan. Masyarakat yang menghadapi persoalan sertifikat atau klaim hak yang saling bertentangan seharusnya mendapatkan penjelasan dan penelusuran riwayat tanah dari lembaga pertanahan.

"Kalau ada dua sertifikat yang saling bertentangan, jangan kemudian masyarakat hanya disuruh berperkara ke pengadilan. Lembaga pertanahan juga harus bisa menjelaskan bagaimana riwayat tanah itu, bagaimana proses penerbitannya, dan di mana letak persoalannya," tegas Iwan.

Besarnya persoalan agraria juga tercermin dalam catatan KPA. Sepanjang 2025, KPA mencatat 341 letusan konflik agraria dengan luas areal sekitar 914.574 hektare dan berdampak terhadap 123.612 keluarga.

Konflik tersebut paling banyak terjadi di sektor perkebunan, disusul infrastruktur, pertambangan, properti, kehutanan, dan fasilitas militer.

Iwan menilai angka tersebut menunjukkan konflik agraria bukan persoalan insidental, melainkan berkaitan dengan persoalan struktural dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Sengketa Tanah Puluhan Tahun Jadi Sorotan

Dalam forum yang sama, Kuasa Hukum PT Surya Prima Pratama (PT SPP), Muchibi, SH, MH, memaparkan contoh persoalan sengketa tanah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Kasus tersebut berkaitan dengan lahan seluas sekitar 5.700 meter persegi di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 68, Jakarta, yang menurut penjelasannya telah menjadi objek sengketa selama 36 tahun.

Muchibi menjelaskan, PT SPP mendasarkan klaimnya pada Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor 24 dan Nomor 25. Dokumen tersebut berkaitan dengan Girik C 778 Persil 20 D2 seluas sekitar 4.500 meter persegi dan Girik C 530 Persil 21 D1 seluas sekitar 1.200 meter persegi.

Namun, terdapat pihak perusahaan lain yang juga mengajukan klaim atas tanah yang dikaitkan dengan Girik C 778. Menurut penjelasan Muchibi, klaim pihak lain tersebut merujuk pada Persil 18 B D2 yang disebut berada di kawasan Jalan Senopati.

Perbedaan nomor persil tersebut menjadi salah satu poin penting yang dipersoalkan. Sebab, kesamaan nomor girik tidak serta-merta membuktikan bahwa dua pihak mengklaim bidang tanah yang sama.

Untuk memperoleh kepastian hukum, PT SPP kembali menempuh jalur hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam gugatan terbarunya, PT SPP turut mengajukan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menurut pihak perusahaan dilakukan secara konsisten sejak 1996 hingga 2026.

"Nilainya pada awalnya sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu. Kemudian, pembayaran terakhir yang kami catat pada 2006 mencapai Rp1,6 miliar. Bagi kami, pembayaran PBB tersebut menjadi salah satu bukti bahwa PT SPP secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakan atas objek tanah yang disengketakan," ungkap Muchibi.

Dalam perkara tersebut, PT SPP mengajukan tuntutan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp86 miliar, ditambah bunga dua persen setiap bulan sampai perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paparan kasus tersebut memperlihatkan bagaimana sengketa pertanahan yang berlangsung berlarut-larut dapat menyebabkan tanah kehilangan fungsi ekonominya. Meski demikian, klaim dan bukti masing-masing pihak tetap harus diuji melalui proses hukum yang berlaku.

Kepastian Hukum untuk Ekonomi Nasional

FGD Forum Pimred Multimedia Indonesia tersebut menegaskan bahwa persoalan pertanahan tidak hanya menyangkut administrasi kepemilikan, tetapi juga berkaitan langsung dengan pemerataan ekonomi, iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan reforma agraria, pada akhirnya, tidak cukup diukur dari banyaknya sertifikat yang diterbitkan atau luas tanah yang dibagikan.

Lebih dari itu, negara dituntut mampu menjamin kepastian hak, mengurangi konflik agraria, memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah, serta memastikan sumber daya agraria dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.

Dengan tata kelola pertanahan yang transparan, terintegrasi, dan berkeadilan, tanah diharapkan tidak lagi menjadi sumber konflik berkepanjangan, melainkan menjadi salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan bersama.

(dam/hmi)









Soal Anggota Sabhara Polsek Rajeg yang Disorot, Seorang Warga Ralat Pernyataan

TANGERANG | TRM

Seorang pria berinisial M meralat pernyataan yang diduga dia sampaikan sebelumnya hingga menjadi bahan pemberitaan. Sebelumnya M mengaku diminta sejumlah uang oleh anggota Sabhara Polsek Rajeg. Namun belakangan M meralatnya.

"Kemarin itu soal duit tidak sampai ada permintaan dan tidak kasih, cuma saya keceplosan saja," kata M.

M juga menegaskan kembali bahwa tidak ada permintaan uang. Dalam informasi yang beredar sebelumnya, M disebut dimintai uang mulai dari Rp3 juta hingga turun menjadi Rp300 ribu.

"Tidak sampai ada, dan saya juga tidak kasih uang," ujarnya.

Selain itu, informasi sebelumnya juga menyebutkan bensin di kendaraan milik M disedot anggota. M pun kembali meluruskan informasi tersebut.

"Setelah saya cek, ternyata di kendaraan saya memang ada bocor, saya kira awalnya disedot, saya keceplosan, ternyata ada bocor, banjir mesinnya," tandas M. (dam)



LAN

Sambungan Hal. 1

lahgunaan narkotika?

Terlebih, LAN memiliki fungsi dan orientasi kelembagaan yang berkaitan dengan upaya pencegahan, edukasi, serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Karena itu, setiap kegiatan yang menggunakan nama organisasi semestinya memiliki dasar kewenangan, struktur kepengurusan, serta pertanggungjawaban yang jelas.

Dalam dokumen tersebut juga ditemukan tanda tangan atas nama Amrul Sani, SP selaku ketua LAN Kota Tangerang periode sebelumnya, disertai sejumlah logo media, di antaranya Media Online Indonesia (MOI), Jurnal Media Indonesia, TerbitHarian.com, dan Mandala Nusantara.News.

Ketika dikonfirmasi, Amrul Sani, SP, menyatakan tidak pernah menerbitkan surat permohonan bantuan dana tersebut. Ia bahkan menegaskan tidak lagi memiliki keterkaitan dengan kepengurusan lembaga yang dimaksud dan menyatakan keberatan atas penggunaan namanya.

"Saya sudah lama tidak ada kaitan dengan lembaga tersebut. Ini sudah menjelekkan nama saya dengan meminta sumbangan kepada Pemerintah Kota Tangerang," tegas Amrul.

Ia juga menyatakan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang diduga menggunakan nama dan tanda tangannya tanpa kewenangan. Dan siap membantu LAN kota Tangerang mengusut tuntas kasus tersebut.

Sementara itu, Ketua LAN Kota Tangerang, Helmy Halim, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan identitas organisasi digunakan secara sembarangan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut administrasi surat-menyurat, melainkan menyangkut kredibilitas, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap organisasi yang selama ini membawa misi sosial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

"Siapa pun oknum yang membawa nama LAN di Kota Tangerang, khususnya dengan cara mencatut atau menyalahgunakan identitas organisasi, akan kami usut sampai tuntas. Jangan sampai tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab merusak citra LAN di hadapan instansi pemerintah maupun swasta," ujar Helmy.

Ia menegaskan, marwah dan martabat organisasi bukanlah atribut yang dapat dipergunakan sesuka hati, terlebih untuk kepentingan pengajuan bantuan dana tanpa kejelasan mandat dan pertanggungjawaban.

"LAN adalah lembaga yang memiliki marwah dan martabat yang harus dijaga. Jika ada pihak yang membawa, mencatut, atau menyalahgunakan nama LAN tanpa kewenangan, kami siap membawa persoalan ini ke jalur hukum," tandasnya.

Helmy juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan membuat laporan resmi kepada kepolisian guna meminta aparat penegak hukum mengusut pihak yang diduga terlibat, termasuk menelusuri asal-usul surat, proses penerbitan, penggunaan identitas organisasi, serta tujuan pengajuan bantuan dana tersebut.

Selain proses hukum, Helmy menuntut pihak yang diduga bertanggung jawab menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada organisasi, instansi pemerintah, serta masyarakat.

Apabila dugaan pencatutan identitas, penggunaan tanda tangan tanpa izin, atau penyampaian keterangan yang tidak benar terbukti, persoalan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum sesuai unsur perbuatan dan alat bukti yang ditemukan.

Ketentuan pidana terkait pemalsuan surat perlu ditelaah berdasarkan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Apabila ditemukan dugaan penggunaan dokumen elektronik, ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah juga dapat ditelaah sesuai unsur perbuatannya.

Di sisi lain, instansi pemerintah sebagai penerima proposal juga patut memastikan keabsahan identitas pemohon, legalitas kepengurusan, dasar kewenangan penandatangan, serta kejelasan tujuan penggunaan dana sebelum mengambil keputusan terkait permohonan bantuan.

Sebab, bantuan yang bersumber dari anggaran maupun fasilitas publik harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

LAN Kota Tangerang menyatakan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum demi menjaga kehormatan organisasi sekaligus mencegah terulangnya dugaan penyalahgunaan identitas kelembagaan. (cng)

PENGEDAR

Sambungan Hal. 1

peredaran obat-obatan tanpa izin edar yang berpotensi membahayakan masyarakat.

“Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat. Kami mengapresiasi kepedulian warga yang telah membantu kepolisian dalam mengungkap dugaan peredaran obat tanpa izin edar. Kami juga akan terus melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat,” terang Herbin.

Ia juga mengajak masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran obat-obatan secara ilegal. Warga diminta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungannya.

Atas dugaan perbuatannya, MF dipersangkakan melanggar Pasal 435 subsider Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Saat ini, penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi dan tersangka, serta mengembangkan kasus untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Polres Metro Tangerang Kota menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran obat-obatan ilegal demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak penyalahgunaan obat. (dam)

PEMPROV

Sambungan Hal. 1

diikuti peningkatan jumlah kendaraan membuat kapasitas jalan semakin tidak sebanding dengan kebutuhan lalu lintas. Kemacetan kerap terjadi pada akhir pekan dan semakin parah saat pertandingan sepak bola maupun musim liburan.

Dampaknya tidak hanya dirasakan penonton pertandingan, tetapi juga masyarakat yang pulang bekerja, orang tua yang menjemput anak, hingga ambulans yang membutuhkan akses cepat.

“Karena itu, apa yang kita kerjakan hari ini bukan hanya untuk sebuah perhelatan olahraga, melainkan juga memberi layanan kepada masyarakat yang setiap hari melintas jalan tersebut,” ujar Andra Soni.

Ia menambahkan, kesiapan infrastruktur jalan menjadi bagian penting dalam menyambut PON XXIII Tahun 2032. Akses yang lebih baik diharapkan dapat menunjang kegiatan olahraga sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Harapan kami sederhana, kelak masyarakat dapat pulang menyaksikan pertandingan di Banten International Stadium dengan gembira dan tiba di rumah tepat waktu. Kemudian masyarakat dapat melintas dengan lancar, baik saat ada pertandingan maupun tidak,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen daerah, Pemprov Banten menyiapkan anggaran Rp50 miliar dalam APBD murni 2027. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung skema pembiayaan bersama (cost sharing), khususnya dalam pengadaan tanah.

Andra menegaskan, Pemprov Banten tidak ingin seluruh kebutuhan pembiayaan dibebankan kepada pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah turut mengambil tanggung jawab agar rencana pelebaran jalan tersebut dapat direalisasikan.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo menyatakan dukungannya terhadap rencana penanganan jalan tersebut. Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk pelebaran jalan dan pembenahan akses di sekitar stadion diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar.

Dody mengatakan, pemerintah pusat akan mengupayakan pembiayaan melalui APBN dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber anggaran agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai.

“APBN itu kan komposisinya macam-macam ya, ada rupiah murni, ada loan, macam-macam. Tapi pasti pakai APBN. Cuma APBN itu dari sisi mananya, nanti kita pikirkan ketersediaannya yang paling cepat, agar kemudian proses fisiknya bisa segera dimulai,” ungkap Dody.

Terkait pengadaan tanah, Dody berharap dukungan Pemprov Banten serta pemerintah kabupaten dan kota agar prosesnya berjalan lancar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan menjelaskan, pelebaran jalan direncanakan membentang sekitar 3,5 kilometer, mulai dari Palima hingga melewati kawasan Pasar Baros. Ruang milik jalan (right of way/ROW) direncanakan menjadi 25 meter dengan empat lajur.

Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan anggaran pengadaan tanah diperkirakan mencapai Rp180 miliar, sedangkan pekerjaan fisik sekitar Rp80 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran proyek diperkirakan mencapai Rp260 miliar.

Dari jumlah tersebut, Pemprov Banten menyiapkan Rp50 miliar untuk mendukung pengadaan tanah. Adapun kebutuhan pembiayaan lainnya akan disinergikan dengan pemerintah pusat melalui APBN.

Arlan menjelaskan, pelebaran jalan mendesak dilakukan karena kepadatan lalu lintas tidak hanya terjadi ketika ada pertandingan di stadion. Pada akhir pekan dan momen tertentu, ruas tersebut juga kerap mengalami kemacetan.

Berdasarkan kajian lalu lintas bersama Kementerian PU, nilai Volume Capacity Ratio (V/C Ratio) ruas jalan tersebut sudah mendekati angka satu. Kondisi itu menunjukkan volume kendaraan yang melintas hampir menyamai kapasitas jalan yang tersedia.

“Artinya, sudah hampir stuck. Makanya urgensinya menjadi sangat penting ketika Banten juga ditetapkan sebagai tuan rumah PON pada 2032,” jelas Arlan.

Untuk tahapan pelaksanaan, pengadaan tanah ditargetkan berlangsung pada 2027 hingga 2028. Selanjutnya, pekerjaan fisik direncanakan pada 2028 hingga 2029. Seluruh tahapan ditargetkan selesai pada 2029 sesuai nota kesepakatan.

Arlan juga berharap pemerintah kabupaten dan kota turut mendukung pelaksanaan rencana tersebut, terutama dalam hal kemudahan perizinan dan koordinasi dengan masyarakat terkait pengadaan tanah.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, pelebaran Jalan Palima–Baros diharapkan mampu meningkatkan kapasitas jalan, mengurangi kemacetan, serta memperlancar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menyiapkan akses menuju kawasan Sports Center Banten dalam menyambut PON XXIII Tahun 2032. (hed/dam)

TAAT

Sambungan Hal. 1

tan Karawaci, Kamis (19/11/2026). Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud sinergi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus membangun budaya taat pajak.

Maryono menegaskan, optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB membutuhkan koordinasi serta kesamaan pemahaman seluruh pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, Samsat, Jasa Raharja, hingga unsur masyarakat. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan optimal dan informasinya tersampaikan secara benar kepada masyarakat.

"Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dipahami oleh jajaran pemerintah. Informasinya harus tersampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman," ujarnya.

Menurutnya, pengurus RT dan RW memiliki peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

"Bapak dan Ibu merupakan unsur yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh pengurus RT dan RW menjadi jembatan informasi yang baik. Sampaikan informasi berdasarkan ketentuan yang benar dan dengan cara yang mudah dipahami warga," pesannya.

Selain program apresiasi dari Pemprov Banten, Maryono juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai keringanan pajak kendaraan bermotor yang berlaku hingga 31 Desember 2026.

Insentif tersebut meliputi pembebasan 100 persen denda PKB, diskon 5 persen atas pokok PKB, serta pembebasan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II).

"Jangan lewatkan berbagai kemudahan ini. Selain mendapatkan keringanan pajak, masyarakat yang membayar sebelum jatuh tempo juga berpeluang mendapatkan hadiah umrah dan sepeda motor dari Pemprov Banten. Mari manfaatkan kesempatan ini dan jadikan kepatuhan membayar pajak sebagai budaya bersama," ajak Maryono.

Melalui sinergi pemerintah dan penyebarluasan informasi secara berkelanjutan, diharapkan semakin banyak masyarakat memahami kebijakan serta kemudahan perpajakan yang tersedia. Meningkatnya kepatuhan membayar pajak juga diharapkan dapat memperkuat penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan. (wil/dam)

MENTERI

Sambungan Hal. 8

rumah milik penerima manfaat program Bedah Rumah yang telah selesai direnovasi di Desa Sukatani. Ia juga membuka kesempatan bagi warga yang belum menerima bantuan untuk mengajukan diri sebagai calon penerima manfaat.

Maruarar langsung menginstruksikan jajaran Kementerian PKP agar menindaklanjuti peluang bantuan tersebut.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah merupakan bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas hunian melalui renovasi maupun pembangunan rumah baru. (dam)

REALISASI

Sambungan Hal. 8

Pemerintah Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih kepada para wajib pajak yang telah taat dan tepat waktu membayar pajak. Semoga kesadaran ini terus meningkat sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat melalui pembangunan daerah," tutur Kiki.

Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Manfaatnya dapat dirasakan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai program bantuan pemerintah.

Sebagai upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Banten juga memperpanjang program relaksasi pajak kendaraan bermotor hingga 31 Desember 2026.

Program tersebut meliputi pembebasan 100 persen denda PKB, diskon 5 persen pokok PKB, serta pembebasan denda BBNKB II. (wil/dam)

PROGRAM

Sambungan Hal. 8

telah bekerja keras menyukseskan kegiatan tersebut. Ia secara khusus mengapresiasi keterlibatan OSIS dan para guru pembimbing yang telah menunjukkan dedikasi, kerja sama, serta tanggung jawab sehingga seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik.

"Keberhasilan sebuah kegiatan bukan hanya dilihat dari kemeriahan acara, tetapi juga dari proses kebersamaan, kekompakan, dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat di dalamnya," kata Shiddiq.

Sementara itu, Kepala SMK Kopti Malingping, Agit Nur Sepdiana, mengatakan terselenggaranya Pentas Kreasi Seni merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi seluruh elemen pendidikan, mulai dari yayasan, dewan guru, OSIS, hingga para siswa.

Menurutnya, antusiasme dan semangat kebersamaan menjadi modal utama dalam menghadirkan kegiatan yang meriah sekaligus memberikan pengalaman berharga bagi peserta didik.

Pada kesempatan tersebut, Agit juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Banten Andra Soni atas pelaksanaan Program Sekolah Gratis. Menurutnya, program tersebut turut memberikan dukungan pembiayaan pendidikan yang dapat dimanfaatkan sekolah untuk mengembangkan berbagai program, termasuk kegiatan yang mendukung minat, bakat, kreativitas, dan potensi siswa.

"Program Sekolah Gratis memberikan kesempatan dan manfaat tidak hanya untuk siswa tapi untuk sekolah agar terus berkembang," ujarnya.

Ia berharap Pentas Kreasi Seni Siswa-Siswi SMK Kopti Malingping dapat menjadi agenda positif yang terus dikembangkan sebagai bagian dari proses pendidikan secara menyeluruh.

Melalui kegiatan seni, bazar, dan pameran karya, siswa tidak hanya belajar menampilkan kemampuan, tetapi juga mengembangkan kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim, jiwa kewirausahaan, serta sikap menghargai karya dan kreativitas orang lain.

"Kegiatan ini menjadi pesan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang perlu diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang," paparnya. (eem/dam)

MTQ

Sambungan Hal. 8

pat koordinasi untuk membahas kesiapan pelaksanaan acara.

"Baru saja panitia MTQ Kecamatan Curug mengadakan rapat untuk persiapan acara," ungkap Arief.

Ia menambahkan, kegiatan MTQ tersebut rencananya akan berlangsung di halaman Kantor Kelurahan Binong.

"Kita berharap semoga kemenangan Kecamatan Curug akan dapat membawa nama harum wilayah pada MTQ tingkat selanjutnya," ujar Camat Curug. (edy/dam)

JUMAT, 20 November 2026
Edisi 3343
Harga Rp4.000

BANTEN NEWS

KORAN ASPIRASI WARGA BANTEN



Menteri PKP: Bedah Rumah Tidak Dipungut Biaya!

TANGERANG | TRM



Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama Gubernur Banten Andra Soni mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau program bedah rumah di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026).

Kunjungan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi Permodalan Nasional Madani (PNM), penyerahan sertifikat tanah gratis, serta dialog Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

"Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan berbagai program strategis di sektor perumahan berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah," ungkapnya.

Menurut Maesyal, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi kunci dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen penuh mendukung program strategis Kementerian PKP. Kehadiran program bedah rumah yang dipadukan dengan kepastian legalitas lahan serta akses pembiayaan sangat membantu meningkatkan taraf hidup warga kami di Cisoka dan wilayah lainnya," ujar Maesyal.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program Bedah Rumah yang merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto diberikan secara gratis atau tanpa pungutan biaya.

"Ini program strategis Pak Prabowo, gratis tanpa dipungut biaya oleh pihak mana pun. Termasuk pegawai Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman)," ujar Maruarar.

Ia juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan pihak yang meminta bayaran, termasuk pegawai Kementerian PKP.

"Kalau ada yang minta uang, mau pegawai perumahan, mau siapa saja foto, 'viralin'. Kita mau perubahan sepenuh hati bukan setengah hati," tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar meninjau

⏭ Baca MENTERI ....Hal. 7



Realisasi Opsen PKB Kota Tangerang Tembus Rp313,8 Miliar

TANGERANG | TRM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang mencatat realisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp313,84 miliar atau 76,62 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp411,25 miliar. Capaian tersebut berdasarkan data per 17 November 2026.

Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibhawa, mengatakan capaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penguatan sinergi pemungutan serta sosialisasi kepada masyarakat.

Selain Opsen PKB, penerimaan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga tercatat mencapai Rp177,21 miliar atau 67,28 persen dari target sebesar Rp268,50 miliar.

"Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami terus berupaya mendorong masyarakat agar semakin memahami pentingnya memenuhi kewajiban pajak, baik PKB maupun BBNKB. Kami tetap optimistis target penerimaan yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahun," ujar Kiki, Kamis (19/11/2026).

Untuk mendukung optimalisasi penerimaan tersebut, Bapenda Kota Tangerang telah menggelar sosialisasi sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB dengan melibatkan 300 pengurus RT/RW dari enam kecamatan.

Kiki juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya secara taat dan tepat waktu. Ia berharap kepatuhan tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya.

"Atas nama Pemerintah Kota Tangerang dan

⏭ Baca REALISASI ....Hal. 7

Program Sekolah Gratis Jadi Amunisi Pengembangan Siswa



LEBAK | TRM

Program Sekolah Gratis yang digulirkan Pemerintah Provinsi Banten dinilai memberikan dukungan bagi pengembangan pendidikan, termasuk dalam mendorong kreativitas dan potensi peserta didik. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan Pentas Kreasi Seni Siswa-Siswi SMK Kopti Malingping yang digelar di Aula Pendidikan SMP Kopti Malingping, Kabupaten Lebak, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi wadah apresiasi bagi siswa untuk menampilkan bakat, kreativitas, dan potensi yang dikembangkan melalui kegiatan sanggar maupun pembelajaran di kelas.

Beragam penampilan seni memeriahkan acara, mulai dari tari, drama, musikalisasi puisi, hingga menyanyi dari masing-masing kelompok sanggar dan kelas. Selain pertunjukan seni, kegiatan ini juga dimeriahkan bazar unit kegiatan siswa serta pameran hasil karya lukis dan kaligrafi peserta didik.

Suasana aula berlangsung meriah dengan antusiasme para siswa yang tampil penuh percaya diri. Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga perlu memberikan ruang bagi pengembangan karakter, keterampilan, kreativitas, dan keberanian siswa dalam mengekspresikan potensi diri.

Ketua Pelaksana, Shiddiq, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang

⏭ Baca PROGRAM ....Hal. 7

MTQ Tingkat Kecamatan Curug Digelar 28 November



TANGERANG | TRM

Pemerintah Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, akan menggelar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kecamatan pada 28 November 2026.

Camat Curug, Arief Rahman Hakim, mengatakan persiapan kegiatan tersebut mulai dilakukan. Bahkan, panitia MTQ Kecamatan Curug telah menggelar ra-

⏭ Baca MTQ ....Hal. 7

